

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. Pengantar Metode Penelitian Hukum, 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Asyhadi, Zaeni, dan Rahmawati Kusuma. Hukum Ketenagakerjaan Dalam Terori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Azhar, Muhammad. Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- Djumadi. Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fahrojih, Ikhwan. Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional. Malang: Setara Press, 2016.
- Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Internasional Labour Organization. Pedoman Mengenai Prinsip Umum Pengawasan Ketenagakerjaan. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2022
- Kertonegoro. Kebebasan Berserikat. Jakarta: Yayasan tenaga Kerja Indonesia, 1998.
- Manulang, Sendjun H. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Nurachmad, Much. Cara Menghitung Upah Pokok, Upah Lembur, pesangon, dan Dana Pensiun Untuk Pegawai dan Perusahaan. Jagakarsa: Visimedia, 2009.

Nurmayani. Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran). Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2009.

Pramukti, Angger Sigit, dan Meylani Chahyaningsih. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara. Yogyakarta: Media Pressindo, 2016.

Purwanto, Helena, and Syaifullah. Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja dan Keamanan Kerja. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Rivai, Veithzal. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Situmorang, Victor, dan Juhir. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sukwaity, Drs, H. Sudirman Jamal, dan Slamet Sukanto. Ekonomi. Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2005.

Sulaiman, Abdullah. Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.

Tjandra, Riawan. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Grasindo, 2009).

Van Voss, Guus Heerma, and Surya Tjandra, eds. Bab-bab tentang hukum perburuhan Indonesia. Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang – Undang.

Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 257 Tahun 2014 tentang Ahli/Kader
Norma Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Permenaker No 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapo
Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan.

Jurnal

Akbar, Jefri Hari. 2016. Politik Hukum Pengaturan Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi Mea 2015. Semarang: Universitas
Islam Sultan Agung, <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6952>.

Casale, Giuseppe. 2012. “Pengawasan Ketenagakerjaan: Apa dan Bagaimana
(Panduan Untuk Pekerja)”. Organisasi Perburuhan Internasional: 11,

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40asia/%40ro-bangkok/%40ilo-jakarta/documents/publication/wcms_189505.pdf.

Claudia, Grenata Petra. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Upaya Penegakan Hukum Pajak di Indonesia”. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 1, No. 3, 240-253.

Darma, Susilo Andi. 2017. “Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat”. *Mimbar Hukum* 29, No. 2: 221 – 234, <https://doi.org/10.22146/jmh.25047>.

Indriani, Maulida. 2016. “Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”. *Gema Keadilan* 3, No. 1: 74 – 85, <https://doi.org/10.14710/gk.2016.3644>.

Lie, Gunardi, Moody Rizqy Syailendra, and Filshella Goldwen. 2023. “Pelanggaran Hak Upah Lembur Pekerja Non-Staf Yang Tidak Diberikan Oleh Pt. Sai Apparel”. *Jurnal Sosial Humaniora* 6, No. 2: 735 – 746.

Loleh, Rifka Riani. 2024. “The Position of the Principle of Balance in the Preparation of Employment Agreements in Indonesia”. *Estudiante Law Journal* 6, No. 2: 374 – 393, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.27975>.

Saisab, Risal Ibran. 2022. “Tugas Dan Wewenang Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Menangani Masalah Ketenagakerjaan Selama Bekerja Diperusahaan”. *Lex Administratum* 10, No. 5: 1-14, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/43057>.

- Solechan. 2019. “Pengawasan Pelaksanaan Sistem Outsourcing yang Berbasis Pada Hak Asasi Manusia”. Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan 2, No. 2: 337 – 348, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.337-348>.
- Sonhaji. 2019. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”. Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan 2, No. 2: 349 – 364, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.349-364>.
- Tumangkar, Totok. 2020. “Pengawasan Ketenagakerjaan Di Bidang Kesejahteraan”. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat 18, No. 1: 70 – 81, <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v18i1.1754>.
- Yanti, A.A. Istri Eka Krisna, and Ni Kadek Mitha Sri Cahyani. 2020. “Implementasi Upah Lembur Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004”. Kerta Dyatmika 17, No. 2: 56 – 57, <https://doi.org/10.46650/kd.17.2.984.56-65>.

Skripsi

- Azizah, Siti Nurul. “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari”. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24256/2/B12115034_skripsi_02-01-2023%201-2.pdf
- Fahrurrozi. “Pengawasan Ketenagakerjaan Pasca Berlakunya UU no 21 tahun 2003 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 81 Tahun 1947 mengenai pengawasan Ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan”. Jakarta: Universitas

Indonesia, 2011. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old24/20237327-S530-Pengawasan%20ketenagakerjaan.pdf>.

Krisnawan, Enrico Didie. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja Atas Kerja Lembur. Surabaya: Universitas Airlangga, <https://repository.unair.ac.id/11044/>.

Artikel

CT-Cat. “Dasar Hitung-hitungan Pemberian Upah”. Hukumonline, 26 Mei 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasarhitung-hitungan-pemberian-upah-lt5ecc9bab6edf6/>.

Hamzah, Herdiansyah. “Seri Hukum Perburuhan: Antara Buruh, Pekerja, dan Karyawan”. Herdi Web, 23 Januari 2014. <https://www.herdi.web.id/seri-hukum-perburuhan-antara-buruh-pekerja-dan-karyawan/>.

Putranto, Puthut Dwi. “Pabrik Garmen di Grobogan yang Viral Karena Salah Satu Buruh Protes ke Bosnya Mulai Bayar Upah Lembur Sebulan”. Regional Kompas, 10 Februari 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/02/10/213949578/pabrik-garmen-di-grobogan-yang-viral-karena-salah-1-buruh-protes-ke-bosnya>.

Tjam, Syamsul Bahri. “Sejarah Profesi Pengawas Ketenagakerjaan”. SPN News, 26 Oktober 2021. <https://spn.or.id/sejarah-profesi-pengawas-ketenagakerjaan/>.

LAMPIRAN

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 145 /UN7.F1/AK/II/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

07 FEB 2025

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No. 16, Semarang
Jawa Tengah

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : Fauzia Bilqis Izzati
NIM : 11000121130362
Alamat : Jl. Baskoro II No. 52, Tembalang, Semarang
Nomor HP : 0895636090735
Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Peranan Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Melindungi Hak Upah Lembur Pekerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

SURAT JAWABAN IZIN PENELITIAN



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Pahlawan No.16 Kode Pos 50241
Telp. 024-8311713 Faks. 024-8311711
Website : disnakertrans.jatengprov.go.id Email : disnakertrans@jatengprov.go.id

SURAT – KETERANGAN

Nomor : 800/163

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD AZIZ, SE, M.Si
NIP : 19680617 199803 1 007
Pangkat / Gol. : Pembina Utama Muda (IV/a)
Jabatan : Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah
Unit Organisasi : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa

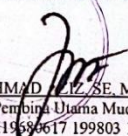
Nama : Bilqis Izzati
NIM : 11000121130362
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian “ Peran Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Melindungi Hak Upah Lembur Pekerja Pada Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah”

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 04 Maret 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH


AHMAD AZIZ, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP:19680617 199803 1 007

PELAKSANAAN WAWANCARA

A. Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Tengah



B. Kongres Aliansi Serikat Buruh Provinsi Jawa Tengah

